

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Effendie, Bachtiar. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993.
- Erawati, Elly & Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Karya Media, 2010.
- Nurasa, Akur & Dian Aries. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*. Sleman: STPN Press, 2020.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung. 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

- Soimin, Sudharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jaka rta: Sinar Grafika, 2001.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Syamsudin. M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial. Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3183 K/Pdt/2010, 12 April 2011. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Bjb, 4 Juni 2014. Banjarbaru: Direktori Putusan PN Banjarbaru.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, 6 November 2018. Gianyar: Direktori Putusan PN Gianyar.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/Pdt.g/2020/PN.Dpk, 10 Mei 2021. Depok: Direktori Putusan PN Depok.

D. Artikel

Anissa, “Cacat Hukum: Pengertian, Penyebab dan Contoh Kasusnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/cacat-hukum-pengertian-penyebab-dan-contoh-kasusnya/>, (terakhir diakses 11 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB).

Riyanto, Mahmud Hadi, & Ahmad Taujan Dzul, “Asas-Asas Putusan Hakim”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, (terakhir diakses 14 November 2024 pukul 19.28 WIB)

Nafiatul Munawaroh, “Makna Cacat Hukum dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-cacat-hukum-dan-contohnya-lt556fa8a2b1100/>, terakhir diakses pada 2 Februari 2025 pukul 23.13 WIB

Wisnu Pradana, Genies, “Pahami Perbedaan Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan dalam Perjanjian”, <https://bplawyers.co.id/2023/11/22/pahami->

[perbedaan-batal-demi-hukum-dan-dapat-dibatalkan-dalam-perjanjian/](#),
(terakhir diakses 11 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, “Glosarium Hukum”,
<https://jdih.bpk.go.id/Info/Glosarium?p=84#:~:text=void%20on%20its%20face,secara%20formal%20terdapat%20cacat%20hukum>, (terakhir diakses
pada 11 Juni 2025 pukul 09.44 WIB)

E. Jurnal

Addien Iftitah, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah beserta Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum Agraria Lex Privatum*, Vol. II, No. 3, (Agustus-Oktober 2014): 49-55

Adhi Nugroho P, “Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentang Kebenaran Fakta Peristiwa dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, (Juni 2016): 1-10
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11946>

Ana Silviana, “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah,” *Law, Development & Justice Review*, Vol 3 No 2 (November 2020): 191-195
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.9523>

Ery Agus Priyono, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador, Jakarta)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No.2 (2017): 1-17
<https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16994>

Eva Riska Isnandya, “Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (*Bedrog*)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2 Article 10, (September 2020): 209-231 <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/10>

Jessica Priscilla Simanungkalit, “Perbuatan Melawan Hukum PPAT dalam Pembuatan Ajb dengan Blangko Kosong”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11, (2021): 2144-2159 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p13>

Jovita Elizabeth, “Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK)”, *Pakuan Law Review*, Vol. 08 No. 01, (Juni 2022): 198-211 <https://doi.org/10.33751/PALAR.V8I1.4776>

Najma Syammila, dkk. “Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 08 No. 01, (Juni 2024): 1013-1023

Nanin Koeswidi A, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 1, (Mei 2016): 279-286
<https://doi.org/10.33541/TORA.V2I1.1130>

Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5 No. 1, (2012): 129-142

Selma Azama Shibghatillah, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl”, *Notarius*, Vol.15 No.1, (April 2022): 51-67
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46024>

Sibuea Mia A R, “Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Cacat Komparisi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.4, No.1, (Maret 2021): 101-112 <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p137-159>

Stephanie Nathania Maramis, “Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI No. 4, (2023): 143-150

F. Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi

Sulistiarto, Erwinsyah. “Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Republik Indonesia Nomor 2806 K/Pdt/2002)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008.

G. Wawancara

Wawancara dengan Hakim Khairul, pada tanggal 6 Maret 2025

Wawancara dengan Hakim Sri Haryanto, pada tanggal 7 Maret 2025

Wawancara dengan Hakim Wahyu Widodo, pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Notaris/PPAT Rahmawati, pada tanggal 7 Maret 2025

Wawancara dengan Notaris/PPAT Habib, pada tanggal 13 Maret 2025

Wawancara dengan Notaris/PPAT Enita, pada tanggal 8 Maret 2025

Wawancara dengan Dosen Masyhud Asyhari, pada tanggal 11 Juni 2025